

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2013**



**JUDUL PENELITIAN
MODELING PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Lebong)**

Tahun ke 1 dari rencana 2 Tahun

PENELITI :

Dr. Fachruzzaman, SE, MDM.,Ak (NIDN: 0013037102)

Dr. Candra Irawan, SH, M.Hum (NIDN: 0015107305)

Robinson, SE, M.Si.,Ak (NIDN: 0008037604)

Nila Aprila, SE, M.Si.,Ak (NIDN: 0015047502)

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2013**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

1. Judul : *Modeling* Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lebong)

2. Ketua Peneliti
 - 2.1 Data Pribadi
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak, CA**
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/Golongan : **197103131996011001/IIIc**
 - d. Srata/Jab. Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : Tidak ada
 - f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
 - g. Bidang Ilmu : Akuntansi Sektor Publik
 - h. Alamat Kantor : Jl WR. Supratman – Bengkulu
 - i. Telepon/Faks/E-mail : 0736 - 344196
 - j. Alamat Rumah : Jl Pratu Aidit No. 165 RT. II RW. IV Kelurahan Kampung Bali – Bengkulu 38224
 - k. Telepon/Faks : 0736 – 342716

 - 2.2 Mata Kuliah yang Diampu dan Jumlah sks
 - a. Mata Kuliah I : Akuntansi Sektor Publik 3 sks
 - b. Mata Kuliah II : Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 sks
 - c. Mata Kuliah III : Manajemen Keuangan Publik 3 sks
 - d. Mata Kuliah IV : Manajemen Kinerja 3 sks

 - 2.3 Penelitian Terakhir
 - a. Judul Penelitian I : Pengaruh Tipe Sistem Pengukuran Kinerja dan Kepedulian Manajemen Terhadap Kinerja Program dan Kinerja Keuangan
 - b. Judul Penelitian II : Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengimplementasian Sistem Pengukuran Kinerja
 - c. Judul Penelitian III : Analisis Keberhasilan Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah
 - d. Judul Penelitian IV : Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja SKPD

3. Lokasi Penelitian : **Kabupaten Lebong – Provinsi Bengkulu**

4. Jangka Waktu Penelitian : 2 (Dua) Tahun

5. Pembiayaan

-	Biaya Tahun ke-1	Biaya diajukan ke Dikti	Biaya dari Instansi
		Rp.42.500.000,00	-
	- Rencana Biaya Tahun ke-2	Rp.46.302.000,00	-



Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Iizar Alfansi, SE, MBA, Ph.D
NIP. 19640601 198903 1 005

Bengkulu, 28 Nopember 2013
Ketua Peneliti,

Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak, CA
NIP. 19710313 199601 1 001



Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum
NIP. 19581112 198603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	5
Bab III Metode Penelitian	12
Bab IV Hasil dan Pembahasan	17
Bab V Penutup	28
Daftar Pustaka	30
Lampiran:	
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	32
Lampiran 2 Laporan Kegiatan FGD	37

ABSTRACT

The purpose of this study to explain that local governments can take responsibility for his government 's performance by providing quality financial statements . For the specific target of this study is to provide a model of increasing the capability of the ability to produce quality accounting information . The method used in this study is a case study and experimental methods . At first the observations and surveys are analyzed and made a map of the problem and solution alternatives , further FGD problems related questions to determine the factors associated with affecting the ability of the government apparatus in generating accounting information quality , further experiments to apply the model of increasing the capability of the Local Government Reform Fiscal accountability . The results of the study resulted in a model with Improved Capability Matrix of Local Government Reform in Fiscal Accountability for Local Government Lebong the grouping of the internal and external sides of the human resources , cultural and / or organizational relationships , and governance.

Keywords : *Regional Apparatus , Improved Capability , Accountability , Regional Finance , Audit Opinion , internal , external , human resources , cultural and / or organizational relationships , and governance.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini supaya pemerintah daerah dapat mempertanggung-jawabkan kinerja pemerintahannya dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu target khusus penelitian ini adalah memberikan model peningkatan kapabilitas kemampuan dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dan eksperimen. Pada awalnya dilakukan observasi dan survei yang dianalisis dan dibuat peta permasalahan dan alternatif penyelesaiannya, selanjutnya FGD terkait peta permasalahan untuk mengetahui faktor-faktor terkait dengan mempengaruhi kemampuan aparatur pemerintah dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas, selanjutnya eksperimen untuk menerapkan model peningkatan kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Hasil penelitian menghasilkan suatu pemodelan dengan Matrik Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk Pemerintah Daerah Lebong dengan mengelompokkannya dari sisi internal dan eksternal dari sisi sumberdaya manusia, budaya dan/atau hubungan organisasi, serta tata kelola.

Keywords: Aparatur Daerah, Peningkatan Kapabilitas, Pertanggungjawaban, Keuangan Daerah, Opini Audit, internal, eksternal, sumberdaya manusia, budaya dan/atau hubungan organisasi, serta tata kelola.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahannya dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan merupakan tuntutan transparansi publik akan akuntabilitas para manajer pemerintah daerah. Hal ini semua pada akhirnya menuntut kemampuan aparatur pemerintah dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Selain sebagai pertanggungjawaban, laporan keuangan yang berkualitas dapat mempengaruhi pembuatan keputusan penyelenggara pemerintah daerah, sehingga apabila semua fakta sudah dipertimbangkan, maka penyelenggara mempunyai risiko yang lebih yang lebih kecil untuk berbuat kesalahan dalam pembuatan keputusan. Semua factor penting untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik (Macfoedz, 1996).

Kualitas informasi ini dapat dihasilkan dengan didukung oleh adanya kualitas aparatur daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

khususnya di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ini diharapkan dapat menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang andal dan akurat.

Penilaian laporan keuangan yang andal dan akurat salah satunya tercermin dari hasil audit laporan keuangan. Namun, hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tahun 2010 hanya tiga kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tabel 1 menginformasikan hasil audit BPK dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

Tabel 1 Hasil Audit BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Bengkulu

No.	Nama Pemda	Opini Audit ¹⁾ BPK		
		2008	2009	2010
1.	Provinsi Bengkulu	WDP	WDP	WDP
2.	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP
3.	Kabupaten Bengkulu Utara	WDP	WDP	WDP
4.	Kabupaten Bengkulu Selatan	TMP	WDP	WDP
5.	Kabupaten Kaur	WDP	WTP	WTP
6.	Kabupaten Muko-Muko	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP
8.	Kabupaten Lebong	TMP	TMP	WDP
9.	Kabupaten Kepahiang	TMP	TMP	WDP
10.	Kabupaten Seluma	WDP	WDP	WDP
11.	Kabupaten Bengkulu Tengah ²⁾	-	WDP	WTP

Keterangan:
1) Opini Audit: WTP = Wajar Tanpa Pengecualian; WDP = Wajar Dengan Pengecualian; TW = Tidak Wajar; TMP = Tidak Memberikan Pendapat.
2) Kabupaten Bengkulu Tengah baru dibentuk pada tahun 2009

Berdasar hal-hal yang disebutkan sebelumnya, penelitian hibah bersaing yang diusulkan adalah: “Modeling Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lebong)”.

B. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah supaya pemerintah daerah dapat mempertanggung-jawabkan kinerja pemerintahannya dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu target khusus penelitian ini adalah memberikan model peningkatan kapabilitas kemampuan dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Untuk itu akan dilakukan pemodelan terhadap Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Lebong. Serangkaian matrik akan disusun dengan pendekatan FGD (*Focus Group Discussion*) dan melalui pendekatan serangkaian instrumen pertanyaan pada aparat pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Lebong. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Lebong

C. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola keuangan daerah khususnya terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terlebih pada pihak-pihak pengambil dan pembuat kebijakan dalam rangka menetapkan aturan untuk mendukung terjadinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya Pemerintah kabupaten Lebong.

BAB II

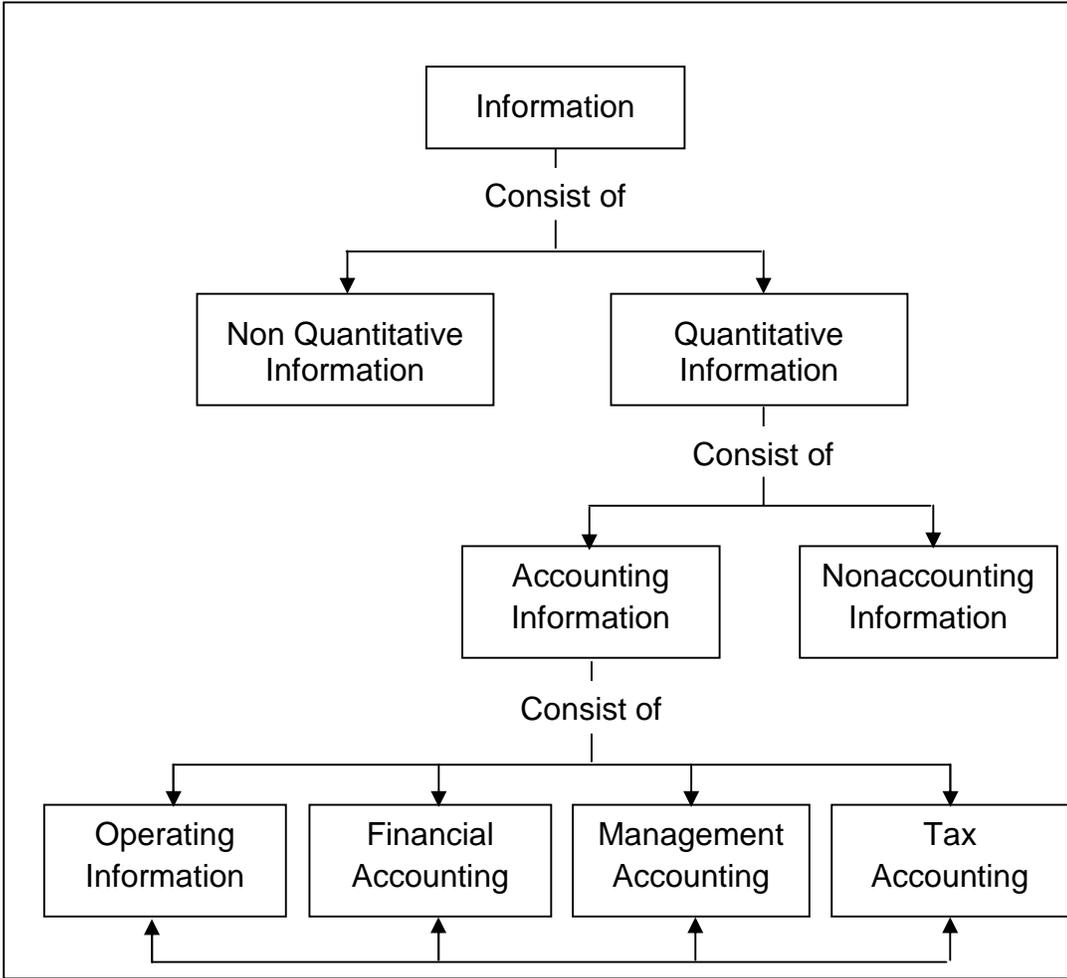
TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif. Kemampuan ini memerlukan dukungan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Informasi akuntansi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan harus didukung dengan adanya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapabilitas.

2.1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai Informasi Akuntansi

Informasi adalah data signifikan yang diolah menjadi suatu bentuk dan mempunyai arti bagi pihak pengguna dalam pembuatan keputusan saat sekarang maupun saat yang akan datang. Pengguna (pengambilan keputusan) membutuhkan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Keunggulan informasi kuantitatif dibandingkan dengan informasi non kualitatif adalah informasi kuantitatif dapat digunakan secara statistik atau matematis untuk keperluan memprediksi perilaku atau gejala variabel yang terjadi dimasa yang akan datang, sedangkan informasi kualitatif harus

dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian digunakan untuk prediksi. Secara rinci, Anthony, *et al.* (1999) menguraikan tipe informasi sebagai yang ilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: Anthony, *et al.* (1999:5)

Gambar 1 *Types of Information*

Informasi yang dihasil oleh sistem akuntansi berupa laporan keuangan, untuk organisasi pemerintah dan nirlaba (Belkaoui, 2004) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi evaluasi efektifitas dari manajemen sumber daya dalam mencapai sasaran organisasi yang secara umum bersifat nonmoneter. Pengukuran-pengukuran kinerja hendaknya dinyatakan sesuai dengan sasaran organisasi nirlaba. Tujuan ini dalam Schoroeder et al. (2011) disebutkan dengan *“an objective of financial statements for governmental and not-for-profit organizations is to provide information useful for evaluating the effectiveness of management of resources in achieving the organization’s goals. Performance measures should be quantified in terms of identified goals”*. Dari pengertian ini, disimpulkan laporan keuangan pemerintahan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akan menjadi informasi untuk evaluasi efektifitas/kinerja pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus dipertanggungjawab dan yang akan dievaluasi terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Agar tujuh laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ini dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja pemerintahan daerah, maka bagian akuntansi dituntut untuk dapat menyajikan informasi akuntansi yang relevan,

akurat, dan tepat waktu. Wilson *et al.* (2001:994) menjelaskan “*there are some factors that will assist in getting an improved reception from the leader: 1) report should be timely. A late report is almost as useless as no report at all, and 2) report must be accurate. Errors on reports result in a lack of confidence in them and in accounting department.*”

2.2 Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat menyampaikan pertanggungjawaban pemakaian sumberdaya dengan menyajikan informasi akuntansi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Hal ini dapat terwujud bila didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas untuk itu. Sumber daya manusia yang berkapabilitas menuntut adanya pemberdayaan aparatur pemerintah melalui pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja pegawai dengan cara pendekatan pendidikan dan pelatihan, pendekatan magang, pendekatan promosi, pendekatan perputaran kerja, pendekatan kesesuaian kerja, dan pendekatan kompetensi (Solikin dan Kustiawan, 2006).

Pengembangan pegawai adalah untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya sekaligus menjadi modal organisasi mencapai tujuannya. Hasibuan (2002) menyebutkan tujuan dan mafaat pengembangan

pegawai yaitu: untuk produktivitas, efisiensi, menghindari kerusakan, kecelakaan, meningkatkan moral, karier dan kepemimpinan.

Pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah perlu diproyeksikan pada kemampuan dan atau pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas tugas/pekerjaan (*job organizing*), wawasan administratif (*administrative concept*), serta kemauan untuk melakukan pengenalan diri (*self knowledge*). Aparatur pemerintah yang memiliki perilaku (*attitude*) dan atau ketertarikan (*interest*) dalam hal-hal: sikap percaya diri (*self confidence*), berorientasi pada tindakan (*action oriented*), dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas diri (*n-Ach*), serta sikap tanggung jawab (*responsibility*) sangat dibutuhkan. (Solikin dan Kustiawan, 2006).

2.3 Studi Pendahuluan yang Sudah Dilaksanakan

Hasil audit dari BPK sebagaimana yang disebut pada latar belakang menunjukkan bahwa kabupaten Lebong memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2008 dan 2009, dan Wajar dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2010. Audit BPK dilakukan merupakan audit laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK);

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ini dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja pemerintahan. Terkait dengan kinerja, penelitian Mihad dan Fachruzzaman (2008) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan pemerintah daerah lebih berorientasi pada kinerja keuangan, dan pengukuran kinerja berada dalam proses adaptasi dan baru akan bergerak pada implementasi. Penelitian Fachruzzaman dan Indriani (2008) menunjukkan bahwa tipe sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah menurut responden mengarah pada tipe *worst case* (yang paling lemah) dimana validitas, legitimasi, dan fungsionalitas dari pengukuran kinerja yang masih rendah.

Hasil penelitian tentang kualitas laporan keuangan, menunjuk bahwa pemahaman pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun pengaruh dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemahaman pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAP. Penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan pemahaman pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah tidak

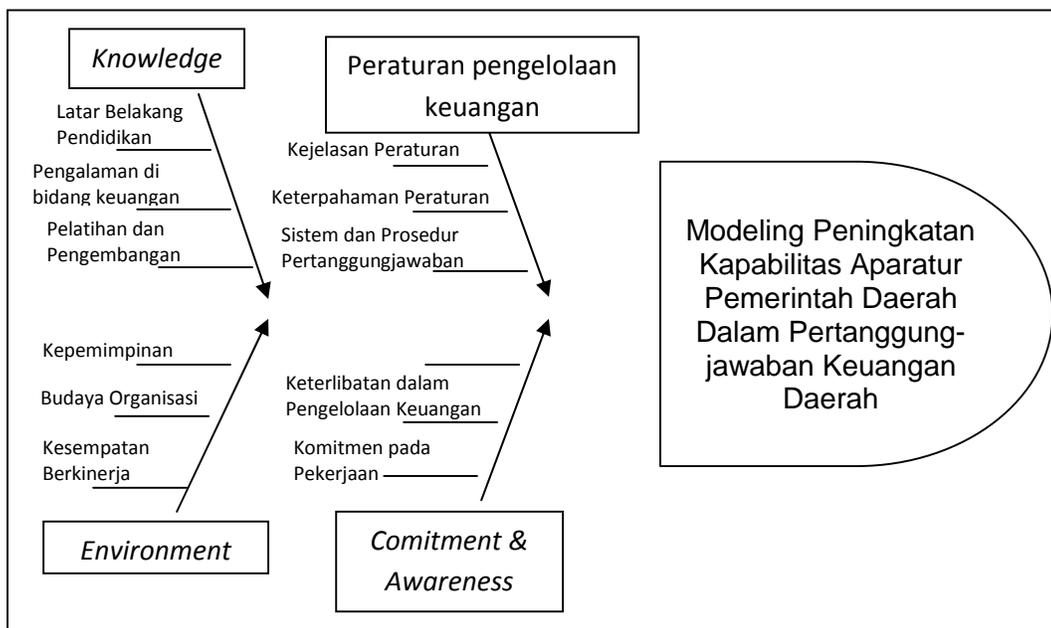
mempengaruhi penerapan SAP dan penerapan SAP tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Leni dan Fachruzzaman, 2010).

Selanjutnya penelitian Valentika dan Fachruzzaman (2011) disebutkan bahwa pendidikan, gaji, pengalaman kerja, kebijakan promosi, insentif, dan komitmen organisasi secara bersama berpengaruh terhadap kesiapan unit kerja dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Penelitian Yunita dan Fachruzzaman (2012) yang dilakukan di provinsi/kabupaten/kota di Bengkulu diketahui bahwa partipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diproksi dengan opini audit. Namun hanya umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang diproksi dengan opini audit, namun dalam penelitian tersebut diketahui bahwa umpan balik anggaran pada wilayah ini cenderung sedang dan rendah, sedangkan evaluasi anggaran cenderung sedang. Adapun hasil penelian Hertika dan Fachruzzaman (2012) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, motivasi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit operasional yang dilihat dari tingkat pelatihan, masa kerja, dan pemahaman akan standar, aturan, gangguan/ tekanan, konsistensi dan tingkat aspirasi serta hubungan sesama tim.

BAB III

METODE PENELITIAN

Diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) adalah alat analisis yang menyediakan cara sistematis untuk melihat efek dan penyebab yang membuat atau berkontribusi terhadap efek-efek. Fishbone diagram dalam hibah penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Hibah Penelitian “Modeling Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”

3.1 Desain Penelitian dalam 3 (Tiga) Tahap dan Indikator Capaian

Desain penelitian ini disusun dalam empat tahapan, yaitu: 1) Survei ke Instansi terkait, 2) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), 3) Perumusan model, dan 4) Uji coba

Tahap pertama: Penelitian ini akan diawali mengurus perizinan, yang dilanjutkan dengan observasi dan survey ke instansi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Keuangan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Inspektoran Daerah, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Survei yang dilakukan akan mendeskripsikan permasalahan, faktor-faktor penyebab dan hal-hal yang harus diperbaiki. Selain survei, observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan model yang paling efektif.

Tahap kedua: sebelum menciptakan model peningkatan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah yang efektif, dari peta permasalahan dan hal-hal yang harus diperbaiki, akan dianalisis untuk memberikan solusi sementara dan langsung dikembangkan pendekatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang akan dibuat matrik solusi permasalahan.

Tahap ketiga: Perumusan Model Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang efektif secara tertulis yang didasarkan dari suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ke empat: Dilakukan uji coba model pada Pemda Lebong dan Pemda Kepayang (pembanding).

Tahap kelima: Uji coba dilanjutkan dan dilakukan revisi model apabila diperlukan. Pada tahun kedua, laporan penelitian hibah bersaing disampaikan dan diajukan ke pemerintah pusat.

Penahapan yang disebutkan sebelumnya termasuk luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2 Tahapan, Luarannya, Lokasi Penelitian, dan Indikator Capaian Penelitian Hibah Bersaing

Tahap	Luaran	Lokasi Penelitian	Indikator
1. Observasi dan Survei ke instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> - BPKP - BPK - Inspektorat Daerah - PEMDA - DPRD 	Peta permasalahan, faktor-faktor penyebab dan hal-hal yang harus diperbaiki sehubungan dengan topik model	BPKP BPK Inspektorat Daerah PEMDA Lebong DPRD Lebong	- Peta.
2. Diskusi Kelompok Terfokus	Matrik solusi permasalahan	PEMDA Lebong	- Matrik. - Partisipasi dosen dalam penelitian

Tahap	Luaran	Lokasi Penelitian	Indikator
3. Perumusan model	Model Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah	PEMDA Lebong	- Adanya Model
4. Uji coba model	Revisi Model berdasarkan uji coba	- PEMDA Lebong - PEMDA Kepayang	- Model yang telah direvisi
5. Pelaporan Akhir	-	-	- Model Final - Laporan Akhir - Publikasi Ilmiah

Apabila kelima tahapan dari desain penelitian ini dapat diwujudkan, diharapkan dapat diperoleh suatu model peningkatan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah yang efektif secara tertulis (data autentik) dan sesuai dengan kondisi perekonomian dan karakteristik bangsa Indonesia khususnya kabupaten Lebong.

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, sehingga lokasi penelitian difokuskan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Adapun sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok responden yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Keuangan,

Bendahara Umum Daerah, Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di lingkungan Kabupaten Lebong.

- 2) Kelompok responden yang berkenaan dengan pengawas keuangan daerah formal yaitu: Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Keuangan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Inspektoran Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 3) Ujicoba model akan dilakukan pada dua kabupaten yaitu kabupaten Lebong dan kabupaten Kepayang, ujicoba di kabupaten Kepayang dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan model pada daerah lain.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong ada sejumlah 109 orang. Seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dijadikan responden untuk pengisian instrument pada tahap awal penelitian yang terkait dengan Modeling Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lebong). Pengembalian kuisisioner diinformasikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Pengembalian Kuisisioner

	Jumlah	%
Kuisisioner yang didistribusikan	109	100%
Kuisisioner yang kembali	45	41%
Informasi yang diberikan pada kuisisioner tidak memadai untuk dilakukan analisis	20	18%
Kuisisioner dianalisis	25	23%

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa pada tahapan awal penelitian diketahui bahwa kuisisioner yang dapat dianalisis adalah sebesar 23% dari 41% kuisisioner yang kembali, hal ini cenderung disebabkan oleh responden tidak ingin menjawab. Pada tahapan observasi dan wawancara diketahui bahwa ketidak inginan menjawab kuisisioner karena responden

memiliki aktivitas yang padat, disamping itu juga khawatir bila informasi yang diberikan bersifat rahasia atau tidak memiliki kewenangan untuk mengisinya. Kuisisioner penelitian disajikan pada Lampiran 1

Adapun kuisisioner penelitian terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Bagian 1 yang berisi data umum responden yaitu dinas/instansi, bagian, nama, umur, jabatan, lama menjabat, jabatan sebelumnya dan pendidikan terakhir.
- 2) Bagian 2 berisi tanggungjawab dan pendidikan/pelatihan terkait dengan pembuatan laporan keuangan.
- 3) Bagian 3, responden diminta mencentang () pada kolom sesuai dengan pilihan responden berdasarkan kondisi yang ada sehubungan dengan pernyataan terkait dengan pemberlakuan PP71 dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Bagian 4 merupakan persepsi responden tentang kesiapan Pemda/Instansi sehubungan dengan penerapan PP71.

ad1) Berdasarkan informasi yang diperoleh pada bagian 1 (satu) diketahui bahwa responden umumnya berasal dari DPPKAD dan dengan pendidikan terakhir sarjana (S1). Lama menjabat pada posisi saat ini antara 5 bulan sampai dengan 2 tahun, dengan rata keseluruhan kurang dari 1 (satu) tahun dengan jabatan sebelum bervariasi. Usia responden berkisar antara 26 sampai dengan 37 tahun; dan hanya 2 (dua) orang berusia diatas 37 tahun, yaitu 39 tahun dan 43 tahun.

Usia responden menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan merupakan pegawai muda dan energik untuk melaksanakan tugasnya namun kurang memiliki pengalaman lama/memadai sehubungan dengan tanggungjawabnya.

ad2) Informasi yang diperoleh dari bagian 2 (dua) hanya 46% responden yang mengisi tanggungjawab pekerjaan khususnya dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui perannya dalam pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan jawaban responden berkenaan dengan pekerjaannya, ada yang menjawab bahwa terbebani dengan tanggungjawab berkenaan dengan perannya dalam laporan keuangan daerah dikarenakan bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara. Selain itu pendidikan/pelatihan/kursus yang diikuti oleh rata-rata responden merupakan pelatihan berdurasi 3 (tiga) hari, hanya Kepala Bidang Aset yang mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan dan seorang pegawai dari sekretariat yang mengikuti kursus selama 2 (dua) minggu.

Adapun opini responden berkenaan dengan pelatihan/kursus yang diikuti tersebut antara lain:

- Penyampaian materi yang kurang jelas
- Pelatihan hanya bersifat legalitas

- Pelatihan yang diselenggarakan cenderung teoritis dan tidak aplikatif.
- Keterbatasan waktu dan biaya sehingga diikuti oleh segelintir orang saja

ad 3) Pilihan responden atas pernyataan terkait dengan pemberlakuan PP71 dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pilihan Responden atas Pernyataan Terkait dengan Pemberlakuan PP71 dalam Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		Jumlah yang Memilih			
		STS	TS	S	SS
1.	Ayat-ayat dalam PP71 tidak mudah untuk dipahami	-	10	14	1
2.	Basis akrual sangat sulit untuk digunakan dalam pembuatan laporan keuangan	-	3	22	-
3.	Petunjuk/penjelasan teknis penggunaan basis akrual di Pemda/Instansi tidak memadai	-	-	22	3
4.	Sosialisasi penerapan PP71 sangat kurang	-	-	17	8
5.	Penerapan basis akrual PP71 tidak menjamin laporan keuangan disajikan secara lebih baik	-	5	17	3
6.	Peraturan-peraturan berkenaan dengan pelaporan keuangan daerah yang masih bertolak belakang.	-	17	8	-
7.	Penggunaan basis akrual sangat membingungkan dalam pelaksanaannya	-	19	6	-
8.	Ayat-ayat dalam PP71 sangat sulit untuk dipahami	-	17	7	2
9.	Penerapan basis akrual amanat PP71 tidak lebih baik dari basis kas sebagaimana yang diterapkan sebelumnya.	-	12	5	4
10.	Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan PP71 dapat menilai kinerja Pemda dengan lebih baik.	-	13	9	-
Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju					

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden cenderung mendapatkan kesulitan untuk memahami PP71 dan penerapan

basis akrualnya, dan 19 dari 25 responden (76%) responden kebingungan dengan penggunaan basis akrual yaitu 19 dari 25 responden (76%). Kesulitan untuk dipahami dan kebingungan penerapannya disebabkan oleh kurang sosialisasi dari PP71, hal ini diindikasikan dari pilihan responden memilih setuju dan sangat setuju atas pernyataan berkenaan dengan sosialisasi PP71. Kurangnya sosialisasi PP71, ditambah tidak memadainya petunjuk/penjelasan teknis penggunaan basis akrual dan kurang kepercayaan pengelola keuangan daerah yang menjadi responden terhadap penerapan PP71 akan membuat pelaporan keuangan dan sebagai penilai kinerja yang lebih baik akan menyebabkan kurangnya motivasi dari pengelola keuangan daerah untuk memahami PP71 dan basis akrual. Namun walaupun demikian, sebagian responden menyakini bahwa ayat PP71 tidak sulit untuk dipahami dan basis akrual lebih baik dibandingkan basis kas walaupun sulit untuk dipahami dan sulit untuk diterapkan.

ad4) Persepsi responden tentang kesiapan Pemda/Instansi sehubungan dengan penerapan PP71.

- 14 dari 25 responden (56%) menyatakan bahwa penerapan PP71 sudah seharusnya dilakukan oleh PEMDA Lebong. 11 responden (44%) menyatakan sudah seharusnya dilakukan namun terburu-buru dengan alasan belum tersosialisasinya PP71, belum dipahami, dan sebaiknya dilakukan secara bertahap.

- Namun dari 56% responden yang menyatakan PP71 sudah seharusnya diterapkan, 57% (8 dari 14 orang) menyatakan bahwa belum ada kesiapan sumberdaya di Pemda Lebong untuk menerapkan PP71. Ketidak siapan ini disebabkan oleh belum adanya sosialisasi PP71, sumberdaya manusia yang tidak mendukung, dan juga dikarenakan oleh etos kerja sumberdaya manusia (yang kurang disiplin, kurang kreatif, dan kurang inovatif).
- Sebanyak 12 orang responden dari 24 orang yang menjawab (1 orang tidak memberikan jawaban) menyatakan bahwa sebagai orang yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah belum siap (dalam artian memiliki kemampuan) untuk menerapkan PP71, hal ini disebabkan oleh belum mendapat pelatihan bahkan sosialisasi dari PP71 dan jaminan keamanan untuk mereka jika menerapkan PP71.

Hasil penelitian dengan metode survei dengan menggunakan kuisisioner yang dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Pemda Kabupaten Lebong belum siap untuk menerapkan PP71. Penyebab dari **“ketidaksiapan tersebut adalah karena kurangnya informasi diperoleh (informasi tidak sampai) sebagai dampak dari sosialisasi tidak tepat sasaran sehingga menjadi tidak efektif; selain itu ketidak siapan dikarenakan sangat minimnya pendidikan/pelatihan/ kursus sehubungan dengan PP71”**.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui faktor penyebab lainnya adalah tinggi rotasi pegawai di Pemda Lebong. Rotasi ini mengakibatkan beberapa pegawai yang telah mendapat pelatihan tidak lagi terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dengan pembuatan laporan keuangan daerah.

Diskusi melalui *Forum Discussion Group* (FGD) dengan responden yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam membuat pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemda Lebong adalah belajar sambil dengan melakukan (melaksanakan tupoksinya khususnya membuat laporan keuangan) dengan proses pendampingan dari pihak-pihak yang kompeten berkenaan dengan pelaporan keuangan, disamping pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran. Proses pendampingan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemda Lebong, namun tidak efektif dan terjebak pada pembuatan laporan keuangan oleh pendamping. Selain itu dibutuhkan kesadaran untuk mentransfer pengetahuan orang yang berpengalaman, baik secara informal maupun formal melalui proses magang. Kegiatan FGD di laporkan secara terpisah pada Lampiran 2.

4.2 Pembahasan

Kapabilitas aparatur pemerintah sangat dipengaruhi banyak faktor dan sangat kompleks, baik faktor internal dan eksternal individu aparatur juga faktor internal dan eksternal organisasi. Secara internal kesesuaian antara kemampuan dan keahlian aparatur dengan tugas mereka, program

pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia akan mempengaruhi kapabilitasnya dalam menjalankan tupoksinya; selain itu *reward* dan *punishment* yang baik akan memotivasi aparatur untuk meningkatkan kapabilitasnya. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen pimpinan, dimana jangan sampai gaya kepemimpinan mengakibatkan loyalitas individu yang salah dengan mengabaikan kepentingan dan tujuan organisasi.

Secara eksternal, interaksi aparatur dengan pihak terkait dan pengelola keuangan dari pemerintah daerah lain sangat diperlukan. Hal ini membutuhkan suatu wadah yang menjembatani komunikasi sesama pengelola keuangan daerah dan pembuat pertanggungjawaban. Wadah ini sudah cukup banyak terbentuk, namun belum menyentuh kepada seluruh pengelola keuangan daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya minat dan kepedulian dari individu aparatur, sebagaimana PP71 sebagian besar responden menyatakan tidak mendapatkan sosialisasi padahal upaya pemerintah pusat sudah banyak untuk melakukan sosialisasi. Ketidadaan minat dan kepedulian aparatur merupakan dampak dari kesesuaian antara kemampuan dan keahlian aparatur dengan tugasnya (yang merupakan akibat lanjutan dari proses rekrutmen dan penempatan pegawai di Pemda) dan juga gaya kepemimpinan dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang mengakibatkan loyalitas individu yang salah dengan mengabaikan kepentingan dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka model peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah

daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemda Lebong diilustrasikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Matrik Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk Pemerintah Daerah Lebong

	SDM	Budaya dan/atau Hubungan Organisasi	Tatakelola
Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten - Kesesuaian kemampuan dan keahlian aparatur - Pimpinan yang memberikan memotivasi positif bawahannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi bagian yang terlibat - Integrasi pengukuran kinerja - Hubungan efektif yang berjalan terus menerus - pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keefektifan dan transparansi rekrutemen - Manajemen kinerja yang transparan - Akses terhadap informasi - Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kapabilitas dan tujuan organisasi - Mekanisme pendanaan
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan - Pelatihan dan pengembangan, serta penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan BPKP selaku pengawas internal - Kerjasama dengan program studi institusi pendidikan dan organisasi profesi terkait yang terkait - interaksi dengan pihak terkait dan pengelelola keuangan dari pemerintah daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme informal maupun formal atas dasar saling menghargai dan <i>win-win negotiation</i>

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan literatur terkait

Tabel 4.1 merupakan model matrik 2x3 peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemda Lebong. Lebih lanjut komponen matrik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A) Mekanisme Internal

1) Sumberdaya Manusia

- Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten.
- Kesesuaian antara kemampuan dan keahlian aparatur
- Pimpinan yang memberikan memotivasi positif bawahannya

2) Budaya dan/atau Hubungan Organisasi

- Koordinasi bagian yang terlibat
- Integrasi pengukuran kinerja
- Hubungan efektif yang berjalan terus menerus
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang terintegrasi

3) Tata Kelola

- Keefektifan dan transparansi rekrutemen
- Manajemen kinerja yang transparan
- Akses terhadap informasi, misalnya peraturan, modul dan petunjuk teknis pelaporan keuangan
- Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kapabilitas dan tujuan organisasi
- Mekanisme pendanaan

B) Mekanisme Ekternal

A) Sumberdaya Manusia

- pendampingan
- pelatihan dan pengembangan, serta penelitian.

B) Budaya dan/atau Hubungan Organisasi

- Kerjasama dengan BPKP selaku pengawas internal
- kerjasama dengan program studi institusi pendidikan dan organisasi profesi terkait yang terkait.
- interaksi dengan pihak terkait dan pengelola keuangan dari pemerintah daerah lain

C) Tata Kelola

- Mekanisme informal maupun formal atas dasar saling menghargai dan *win-win negotiation*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya model peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah di kabupaten Lebong menggunakan mekanisme internal dan eksternal dengan memperhatikan aspek sumberdaya manusia, budaya dan/atau hubungan organisasi, dan tata kelola. Upaya peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Lebong masih sangat mungkin dilakukan karena adanya keinginan dari para pelaku, dalam hal ini aparatur pengelola keuangan daerah untuk dapat melakukan yang terbaik.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini masih harus dilanjutkan dengan memperluas cakupan serta memperdalam topik dalam FGD serta dengan melibatkan pihak pemeriksa keuangan daerah, baik itu pemeriksa internal pemerintah seperti Inspektorat daerah, maupun Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP), serta pemeriksa eksternal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Kantor Perwakilan Provinsi. Sinergitas dipandang perlu sehingga keluaran berupa matrik peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah ini dapat dikembangkan dan lebih bernilai secara teknis untuk dapat diterapkan oleh Kepala Daerah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Keterbatasan

Pengujian terhadap model belum dilakukan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji model. Sedangkan dalam pengemplementasiannya membutuhkan evaluasi terus-menerus untuk perbaikan, dan untuk adaptasi dengan perkembangan daerah dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., Hawkin, David F., dan Merchant, Kenneth A. (1999). *Accounting: Text and Case*. Tenth Edition. McGraw-Hill/Irwin
- Belkaoui, Ahme Riahi. (2004). *Accounting Theory*. Cengage Learning.
- Bisman, Jayne, 2010, Postpositivism and Accounting Research: A (Personal) Primer on Critical Realism, *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, Vol. 4 Issue. 4
- Creswel, James W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication
- Fachruzzaman dan Indriani, Rini. (2008). Analisis Keberhasilan Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten Bogor. Dosen Muda.
- Hertika, Elvira dan Fachruzzaman. (2012). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Operasional yang Dilaksanakan oleh Aparat Inspektorat Kota Bengkulu dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Leni dan Fachruzzaman. (2010). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu suatu Tinjauan atas Pemahaman Pegawai Bagian Keuangan atas Penyusunan Laporan Keuangan
- Malayu, Hasibuan SP. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara.
- Mihad, Sulaiman dan Fachruzzaman. (2008). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengimplementasian Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Dosen Muda.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Schroeder, Richard G., Clark, Myrtle W., dan Cathey., Jack M. (2011). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. 10th edition. Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Solikin, Ikin dan Kustiawan, Memen. (2006). Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam

Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume III Nomor 3.

Yunita, Siska dan Fachruzzaman. (2012). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Valentika, Chindhi Putri dan Fachruzzaman. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Unit Kerja dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

KUISISIONER PENELITIAN

Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lebong)

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Penelitian merupakan jembatan antara ilmu pengetahuan dengan praktek yang sesungguhnya (*real word*), serta dapat memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan keseharian sesuai dengan fokus yang diteliti. Untuk tujuan ini, sebuah penelitian sangat membutuhkan data-data yang andal dan relevan. Khusus penelitian di bidang humaniora, penelitian yang berhubungan dengan manusia akan membutuhkan data-data yang bersumber dari responden yang salah satunya dapat menggunakan kuisisioner, sehingga kami sangat berharap dan mengandal Bapak/Ibu untuk mengisi "seluruh pertanyaan kuisisioner sesuai dengan kondisi yang ada".

Atas kesedian Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini dan sekaligus mengambil bagian dari berkembangnya ilmu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,
Peneliti

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi jawaban berikut ini:

Bagian A

Dinas/Instansi :

Bagian :

Nama :
(boleh tidak disini)

Umur :

Jabatan :

Lama menjabat :

Jabatan sebelum ini :

Pendidikan terakhir :

(sebutkan beserta bidangnya, contoh:

- SMA IPS
- S1 Manajemen
- S1 Agronomi dan S2 MM
- S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 Akuntansi
- DII

Bagian B

Tanggungjawab Bapak Ibu dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemda/Instansi:

- 1) Apakah Bapak Ibu terbebani dengan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan?
- a. Tidak
 - b. Ya (jelaskan alasan Bapak/Ibu memilih b)

- 2) Pendidikan/pelatihan/kursus terkait dengan pelaporan keuangan daerah yang pernah diikuti dalam 3 tahun terakhir

Nama Pendidikan/Pelatihan/Kursus	Tahun	Lama

3) Apakah pendidikan/pelatihan/kursus yang pernah Bapak/Ibu ikuti tersebut mendukung tugas Bapak/Ibu dalam pembuatan laporan keuangan Pemda/Instansi:

- Ya
- **Masih kurang** (jelaskan penyebabnya)

.....

.....

.....

.....

4) Pendidikan/pelatihan/kursus yang ingin Bapak/Ibu ikuti untuk mendukung tugas Bapak/Ibu terkait dengan pembuatan laporan keuangan Pemda/Instansi (disebutkan):

.....

.....

.....

.....

Bagian C

Saat ini, sehubungan dengan pembuatan laporan keuangan daerah pemerintah memberlakukan PP71.

Pertanyaan berikut ini berkenaan dengan PP71 dengan mencentang (v) pada kolom sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu berdasarkan kondisi yang ada

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

		STS	TS	S	SS
1.	Ayat-ayat dalam PP71 tidak mudah untuk dipahami				
2.	Basis akrual sangat sulit untuk digunakan dalam pembuatan laporan keuangan				
3.	Petunjuk/penjelasan teknis penggunaan basis akrual di Pemda/Instansi tidak memadai				
4.	Sosialisasi penerapan PP71 sangat kurang				
5.	Penerapan basis akrual PP71 tidak menjamin laporan keuangan disajikan secara lebih baik				
6.	Peraturan-peraturan berkenaan dengan pelaporan keuangan daerah yang masih bertolak belakang.				

		STS	TS	S	SS
7.	Penggunaan basis akrual sangat membingungkan dalam pelaksanaannya				
8.	Ayat-ayat dalam PP71 sangat sulit untuk dipahami				
9.	Penerapan basis akrual amanat PP71 tidak lebih baik dari basis kas sebagaimana yang diterapkan sebelumnya.				
10.	Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan PP71 dapat menilai kinerja Pemda dengan lebih baik.				

Bagian D

Saat ini, sehubungan dengan pembuatan laporan keuangan daerah pemerintah memberlakukan PP71. Pertanyaan berikut ini berkenaan kesiapan Pemda/Instansi dan Bapak/Ibu sehubungan dengan penerapan PP71:

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu berkenaan dengan penerapan PP71
 - a. Sudah seharusnya (lanjut ke point 3)
 - b. Sudah seharusnya namun terburu-buru
 - c. Tidak seharusnya

- 2) Diisi jika Bapak/Ibu memilih jawaban b atau c pada point 1.
Jelaskan alasan Bapak/Ibu memilih b atau c

- 3) Apakah sumber daya (resource) Pemda/Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja siap untuk menerapkan PP71 tersebut?
 - a. Siap
 - b. Belum siap (jelaskan sisi ketidaksiapannya)

- 4) Menurut Bapak/Ibu apakah kendala utama Pemda/Instansi dalam penerapan PP71

- 5) Dalam menjalankan tugas Bapak/Ibu, sebagai orang yang terlibat dalam

pembuatan laporan keuangan daerah apakah Bapak/Ibu siap (dalam artian memiliki kemampuan) untuk menerapkan PP71 tersebut?

- a. Siap**
- b. Belum siap (jelaskan segi ketidaksiapannya)**

6) Menurut Bapak/Ibu apakah kendala utama penerapan PP71 dalam pelaksanaan tugas Bapak/Ibu membuat laporan keuangan?

7) Menurut Bapak/Ibu, apakah kendala dalam peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah

8) Mohon saran-saran Bapak/Ibu peningkatan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah

Mohon semua pertanyaan diisi jawaban(tidak ada yang kosong (tidak dijawab)). Apabila lembaran ini tidak cukup untuk menulis, Bapak/Ibu bias menulisnya di kertas lain dengan tidak lupa menuliskan nomor kendali kuisisioner.

Atas partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

LAPORAN KEGIATAN FGD

**PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG)**

HIBAH BERSAING – UNIVERSITAS BENGKULU

**TANGGAL 1 – 3 NOVEMBER 2013
KABUPATEN LEBONG - PROPINSI BENGKULU**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU
BENGKULU, 3 NOPEMBER 2013**

LAPORAN KEGIATAN FGD
PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG)

KABUPATEN LEBONG - PROPINSI BENGKULU

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Tanggal Kegiatan : 1 -3 November 2013
- Tempat Kegiatan : Ruang Rapat DPPKAD Kabupaten Lebong
- Ketua Tim : Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA
- Tim Pelaksana : 1. Dr. Chandra Irawan., SH., MH
2. Robinson, SE., M.Si., Ak., CA
- Tim Sekretariat : 1. Herawansyah, SE., M.Ak (Tim)
2. Elsilvera (Daerah)
- Jumlah Undangan : 20 orang
- Hadir : 15 orang
- Tidak Hadir : 5 orang
- Daftar Peserta:

No,	Nama	Jabaatam
1.	Syarifudin	Kabid Aset DPPKAD
2.	Hari Parjaka	Kasubid Anggaran
3.	Desi Novita., SH	Kasubag Kepegaiawan DPPKAS
4.	Amirudin Iskandar	Kasubbid Verifikasi
5.	Lia Ayu Lastrini., S.STP	Kasubbud Perhitungan dan Penilaian Aset
6.	Shalahudin Al Khaidir	Bendahara Pengeluaran
7.	Rapinala	Kasubbid Monev
8.	Andi	Kabid Anggaran dan Pembukuan
9.	Elsivera	Kabid
10.	Lesta Trimiska	Kasubbid Pembukuan DPPKAD
11.	M. Ronaldi	Kepala Bagian Ekonomi
12.	Fitri	Staf bagian Perekonomian
13.	Yudi Indarto, SE	Kasubag
14.	Warles Fery	Staf di Bidang Orsi
15.	Arief	Kasubbid di PPKAD

2. HASIL KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan FGD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Kabupaten Lebong - Propinsi Bengkulu dengan kegiatan dideskripsikan sebagai berikut:

2.1.1 Hari Pertama (1 Nopember 2013)

A. Kehadiran Tim FGD, Sekretariat Daerah

Tim pelaksana datang ke kota Muaraaman pada tanggal 1 Nopember 2013 siang.

B. Rapat Koordinasi:

- Pelaksanaan rapat koordinasi awal dimulai jam 17.00 s/d 18.30, yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA. Kegiatan dilaksanakan di restoran hotel.
- Kegiatan dihadiri oleh tim pelaksana, tim sekretariat.
- Kegiatan diawali dengan pembukaan dan perkenalan.
- Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat
 - a) Agenda:
 - Pengecekan akhir responden yang akan hadir: responden yang diundang dan dapat dikonfirmasi sejumlah 20 orang. Apabila pada hari pelaksanaan ada peserta yang tidak hadir, diputuskan untuk tetap menyelenggarakan FGD jika telah dihadiri oleh lebih dari 50% peserta
 - Kesiapan tempat acara: Kegiatan di-*setting* di Ruang Rapat DPPKAD Kabupaten Lebong. Dipastikan kesiapan LCD dan Kabel Penyambung Listrik.
 - b) Skenario pelaksanaan FGD: Pelaksanaan rapat DPPKAD Kabupaten Lebong dimulai pada pukul 08.30-09,30 yang dihadiri oleh semua peserta, tim pelaksana, dan sekretariat. Setelah *break* (*snack* pagi) pada pukul 10.00, dilaksanakan FGD hingga 12.15, dan FGD dilanjutkan kembali setelah ISHOMA.
FGD dibagi 3 (tiga) sesi:
Sesi 1 (10.00-11.05): Pemahaman PP71
Sesi 2 (11.10-12.15): Kendala dalam proses pelaporan pertanggung-jawaban keuangan daerah
Ishoma (12.15-13.15)
Sesi 3 (13.15-14.20): Faktor penghambat dan penunjang dalam pelaporan pertanggung-jawaban keuangan daerah
Penutupan dilakukan pada pukul 14.30-14.45
 - c) Pada pukul 15.00 akan dilakukan rapat koordinasi akhir.

2.1.2 Hari Kedua (2 Nopember 2013)

A. Rapat (Pertemuan) Pleno:

- Dimulai pukul 08.30 dibuka oleh moderator dari sekretariat di daerah. Kegiatan dilaksanakan DPPKAD Lebong. Acara dilanjutkan ke agenda penjelasan umum kegiatan FGD.
- Kegiatan dihadiri oleh peserta sejumlah 12 orang, tim pelaksana, dan sekretariat.
- Penjelasan umum dipaparkan oleh Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA.

B. Kegiatan FGD

1) FGD sesi 1 Pemahaman PP71

- Pelaksanaan FGD sesi 1 dimulai jam 10.00 diawali dengan pengarahan oleh Dr. Chandra Irawan., SH., MH yang dilanjutkan dengan diskusi (peserta diberi kopi PP671 dan lampirannya).
- Setelah ±20 menit peserta mempelajari PP671 dan lampirannya ada beberapa pertanyaan yang muncul: antara lain tentang basis pencatatan akrual dan anggaran akrual.

2) FGD sesi 2 Kendala dalam proses pelaporan pertanggung-jawaban keuangan daerah

- Pelaksanaan FGD sesi 2 dimulai jam 11.10 diawali dengan pengarahan Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA yang dilanjutkan dengan diskusi (membahas fungsi yang terkait, dokumen, catatan, nama dan pengkodean akun, dan laporan)

3) *Break* (Makan Siang): Pukul 12.30 s/d 13.30

4) FGD sesi 3: Faktor penghambat dan penunjang dalam pelaporan pertanggung-jawaban keuangan daerah

- Pelaksanaan FGD sesi 2 dimulai jam 13.15 diawali dengan pengarahan Robinson, SE., M.Si., Ak., CA yang dilanjutkan dengan diskusi (membahas SDM, dukungan manajemen, pendanaan dan lainnya yang terkait)

5) Penyelesaian kegiatan

C. Penutupan kegiatan

Pada pukul 14.30 acara ditutup oleh Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA..

D. Rapat Koordinasi Akhir

- 1) Rapat koordinasi akhir dimulai pukul 15.00, membahas kegiatan setiap sesi.
- 2) Seluruh tim pelaksana hadir pada acara rapat koordinasi.
- 3) Rapat selesai di pukul 16.30

2.1.3 Hari Ketiga (3 Nopember 2013)

Finalisasi Laporan Kegiatan FGD

- Pembacaan draf laporan dan masukan serta perbaikan oleh semua tim
- Tim bersiap-siap kembali ke Bengkulu

2.2 Hasil Diskusi pada FGD

Komentar dan masukan ataupun pendapat dan saran dari peserta FGD, tanya jawab dan lain-lain

No.	Nama	Komentar/Masukan
Sesi 1		
1.	Lia Ayu Latrini., S.STP	<ul style="list-style-type: none">• Minta penjelasan terkait basis pencatatan akrual dan anggaran akrual
2.	Desi Novita., SH	<ul style="list-style-type: none">• Bertanya tentang perbedaan dengan sebelumnya dan aturan teknis implementasinya
3.	Shalahudin Al Khaidir	<ul style="list-style-type: none">• Meminta buletin teknis SAP
Sesi 2		
1.	Harry Parjaka	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana pemecahan masalah aset-aset yang belum jelas karena dokumen yang tidak mendukung.• Kepastian hukum atas kepemilikan aset antar kota/kabupaten pemekaran dan dengan propinsi
2.	Elsivera	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi antara Dinas/Bagian yang ada di PEMDA masih kurang.• Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan pada Institusi pemerihan.• Bagaimana dengan transaksi yang tidak didukung oleh bukti.
3.	Amiruddin Iskandar	<ul style="list-style-type: none">• Minta waktu untuk mempelajari PP71 dan buletin teknisnya dan untuk diskusi lebih lanjut,• Meminta tim untuk membuat sesi pemaparan/pengajaran terkait dengan buletin teknis SAP .
4.	Amirudin Iskandar	<ul style="list-style-type: none">• Kabupaten Lebong mempunyai tim pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan atau anggaran.

No.	Nama	Komentar/Masukan
Sesi 3		
1.	Syarifudin	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembuatan pelaporan memiliki program aplikasi, sehingga tidak memiliki masalah yang krusial. Permasalahannya terletak pada SDM yang menginput data. • Pekerjaan input data merupakan hal teknis, sehingga tidak harus dari lulusan akuntansi. Yang diperlukanlah adalah operator dari program tersebut.
2.	Andi	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan koordinasi pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) terutama pendanaan pengembangan karyawan, • Rotasi pegawai menyebabkan staf yang dilatih tidak lagi terlibat dalam pelaporan keuangan, dan staf yang dilatih tidak pula menyampaikan ke kolega lainnya (hanya untuk pribadi). • Penganyaman dalam organisasi, dan sudah umum bahwa yang diberi kepercayaan adalah orang-orangnya selalu sama demikian juga orang yang mau bekerja
3.	Rapinala	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan keamanan pelaksanaan tugas.

2.3 Lain-lain

Hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan, perubahan dari rencana kegiatan dan lain-lain:

- Peserta ada yang tidak datang
- Peserta agak terlambat datang
- Ada peserta meninggalkan kegiatan/pulang tanpa seizin panitia pelaksana kegiatan

Lebong, 3 Nopember 2013
 Dr.Fachruzzaman, SE., MDM., Ak., CA
 Dr. Chandra Irawan., SH., MH
 Robinson, SE., M.Si., Ak., CA
 Nila Aprila, SE, M.Si., Ak, CA